

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH TERPENCIL

Amri

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seluma Jl. Sukarno Hatta Komplek Perkantoran Seluma
e-mail: amri.drs.p.mail.com

Abstract: In general, this study aimed to describe the differences and similarities management of funding school operational assistance in school on isolated region between junior High Schools 30 and 43 Seluma. The specific objective of this study was to describe: the differences and similarities in budget drafting and school activities, the use, monitoring and evaluation, and reporting the use of funding school operational assistance in school. The method used in this research is to use the comparative descriptive comparative approach. The results showed there were differences and similarities of the differences and similarities of the management of of funding school operational assistance in school on isolated region.

Keywords: funding school operational assistance, school, isolated region

Abstrak: Tujuan penelitian ini secara umum untuk mendiskripsikan perbedaan dan persamaan pengelolaan bantuan operasional sekolah daerah terpencil antara SMPN 30 dan 43 Kabupaten Seluma. Tujuan penelitian secara khusus adalah untuk mendeskripsikan: perbedaan dan persamaan penyusunan rencana anggaran dan kegiatan sekolah, penggunaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil antara SMPN 30 dan 43 Seluma. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah komparatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan dan persamaan pengelolaan bantuan operasional di sekolah daerah terpencil. Saran penelitian agar pemerintah memberikan bantuan operasional sekolah secara kontinu dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

Kata kunci: dana bantuan operasional sekolah, sekolah, daerah terpencil

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat). Dalam

rangka melaksanakan tekad tersebut di satu sisi, serta kemampuan masyarakat yang terus menurun sebagai dampak dari kenaikan harga BBM, maka Pemerintah menerapkan dan mengembangkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus dita

siswa. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid.

Dalam Dirjen Dikdasmen Kemendikbud (2014:3) disebutkan bahwa secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selain daripada itu, diharapkan program BOS juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 1) membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah; 2) membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; dan 3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/ SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Dengan mempertimbangkan bahwa biaya operasional sekolah ditentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah peserta didik, maka mulai tahun 2014 ini besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dibedakan menjadi dua kelompok sekolah, sebagai berikut: 1) Sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 80 (SD/SDLB) dan 120 (SMP/SMPLB/Satap) BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan ketentuan: a) SD/SDLB: Rp 580.000,-/peserta didik/tahun dan b) SMP/SMPLB/SMPT/Satap: Rp 710.000,-/peserta didik/tahun; dan 2) Sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 80 (SD/SDLB) dan 120 (SMP/SMPLB/Satap), dihitung sebanyak 80 untuk SD/SDLB dan 120 untuk SMP/SMPLB/Satap). (Dirjen Dikdasmen Kemendikbud (2014:3-4).

Dalam ketentuannya, penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta

rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan (Supriadi, 2006:3), khususnya dalam melaksanakan proses pembelajaran bagi siswa.

Dengan demikian, jelas bahwa untuk berjalannya operasional sekolah sangat ditentukan oleh faktor pembiayaan pendidikan, baik dalam besarnya, pengalokasian yang tepat, maupun pemanfaatan realisasi biaya yang mengarah kepada kebutuhan proses belajar mengajar, maupun untuk kemampuan pengelolaan mutu, baik mutu guru, mutu alat, mutu bahan maupun mutu siswa. Semuanya berkaitan satu sama lain dalam proses belajar mengajar di sekolah dan tentunya untuk menjalankannya, sekolah membutuhkan dana atau biaya.

Biaya/dana pendidikan merupakan salah satu input kegiatan dan sekaligus sebagai sumberdaya yang sangat penting dalam pendidikan. Tanpa dukungan dana yang memadai maka akan sulit memperoleh mutu sekolah. Pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi, maka diperlukan perencanaan biaya, analisis biaya serta alokasi biaya untuk penyelenggaraan pendidikan. Setiap sekolah memiliki prioritas pembiayaan yang berbeda satu sama lain, akan tetapi fokus pembiayaan harus tetap diarahkan penggunaannya kepada pencapaian standar nasional pendidikan peningkatan mutu sekolah.

Untuk dapat memenuhi standar nasional pendidikan di sekolah dan sekaligus mewujudkan sekolah yang bermutu tersebut tentunya diperlukan sumber daya dan dana yang besar. Sebagian sekolah ternyata belum mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan tersebut, terkhusus sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil. Γ

Nasional Pendidikan tersebut akan semakin sulit bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil. Masalah utama di daerah terpencil adalah minimnya fasilitas, kurangnya tenaga pengajar, serta susah akses. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa, pelayanan pendidikan khususnya untuk daerah-daerah terpencil masih minim dilakukan, sehingga berbagai masalah yang menghambat proses pendidikan di daerah terpencil ini belum dapat teratasi.

SMP Negeri 30 Seluma, adalah sekolah yang berada di wilayah terpencil di Kabupaten Seluma. Sekolah dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 10702669 berada di Desa Padang Capo Kecamatan Lubuk Sandi. Sekolah yang berjarak 45 KM dari pusat ibu kota kabupaten dengan akses jalan yang cukup sulit, berdebu ketika panas dan dan licin ketika musim hujan. Jumlah tenaga pengajar di SMP berjumlah 8 orang terdiri atas 4 orang PNS dan 4 orang tenaga honorer, serta 2 orang PTT dan jumlah siswa di sekolah ini sebanyak 31 orang. (Sumber: <http://referensi.data.kemendikbud.go.id/npsn-10702669>, diakses pada Bulan Nopember 2014).

Sebagai sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Seluma, pada pelajaran 2014 jumlah penerimaan dana BOS SMPN 30 Seluma berjumlah Rp. 21.300.000,- pertriwulannya, dengan jumlah per semesternya sebesar Rp. 42.620.000,-, dan untuk satu tahunnya berjumlah Rp. 85.200.000,- (Sumber: <http://lapor.bos.kemendikbud.go.id>). Besaran BOS yang diterima SMPN Negeri 30 Seluma ini sejalan dengan kebijakan sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 120 untuk SMP/SMPLB/Satap dihitung sejumlah 120 siswa.

SMP Negeri 43 Seluma, adalah sekolah yang berada di wilayah terpencil di Kabupaten Seluma. Sekolah dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 10703430 berada di Desa Bukit Gadis Kecamatan Sukaraja. Sekolah yang berada di daerah terpencil ini berjarak 57 KM dari pusat ibu kota kabupaten dengan akses jalan yang cukup sulit. Jumlah tenaga pengajar di SMP Negeri 43 Seluma adalah 10 orang terdiri atas 5 orang PNS dan 5 orang tenaga honorer, serta 4 orang PTT dan jumlah siswa di sekolah ini sebanyak 41 orang. (Sumber: <http://referensi.data.kemendikbud.go.id/npsn-10703430>, diakses pada Bulan Nopember 2014).

Jumlah dana BOS yang diterima SMP Negeri 43 Seluma pada tahun 2014 juga berjumlah Rp. 21.300.000,- pertriwulannya, dengan jumlah per semesternya sebesar Rp.

42.620.000,-, dan untuk satu tahunnya berjumlah Rp. 85.200.000,- (Sumber: <http://lapor.bos.kemendikbud.go.id>). Besaran BOS yang diterima SMPN Negeri 43 Seluma ini juga sejalan dengan kebijakan sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 120 untuk SMP/SMPLB/Satap dihitung sejumlah 120 siswa.

Dengan jumlah murid yang di bawah 120 orang, sekolah ini pada tahun 2014 sudah mendapatkan dana BOS dengan jumlah yang setara dengan 120 siswa. Dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 21.300.000,- untuk pertriwulannya, SMP 30 dan 43 Seluma sudah menggunakan dana BOS yang diterima sesuai dengan panduan yang ditetapkan. Dana BOS yang diterima di SMP Negeri 30 dan 43 Seluma digunakan untuk memenuhi pembiayaan sebagai berikut: pengembangan perpustakaan; pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru; kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler peserta didik; kegiatan ulangan dan ujian; pembelian bahan habis pakai; langganan daya dan jasa; perawatan sekolah; pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer; pengembangan profesi guru; membantu peserta didik miskin; pembiayaan pengelolaan BOS dan pembelian dan perawatan perangkat komputer (Sumber: <http://lapor.bos.kemendikbud.go.id>).

Di lapangan, dalam pengelolaan dan BOS tentunya terdapat masalah. Dengan diberikannya dana BOS yang setara dengan 120 siswa bagi sekolah yang muridnya tidak mencapai 120 bukan berarti bahwa permasalahan pendanaan BOS berhenti. Diduga, masalah yang baru muncul terkait dengan penyelewengan dana BOS di sekolah-sekolah dananya lebih dikarenakan jumlah murid ini. Masih lemahnya pengawasan dan kontrol yang dilakukan juga menyebabkan dana yang diberikan dikhawatirkan tidak jadi dimanfaatkan untuk peningkatan mutu sekolah di daerah terpencil. Bahkan, juga tidak sedikit juga sekolah yang melakukan kesalahan dan penyelewengan tidak dengan sengaja, karena tidak tahu lagi dana yang ada digunakan untuk apa. Ada juga sekolah yang dengan faktor ketidaktahuan, atau ketidak-sengajaannya, membeli keperluan diluar ketentuan dan peruntukan dana BOS.

Hal ini membuktikan bahwa sekolah di daerah terpencil memang kewalahan dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik dengan alasan tidak mencukupi ataupun setelah dana y

berlebih dari mencukupi. Orang tua murid pun menjadi bingung dengan dana ini. Mereka sering mengeluhkan, mengapa setelah adanya dana BOS, mereka kadang mesti juga diharuskan membayar biaya lainnya di sekolah. Disisi lain, masyarakat juga belum merasakan adanya dampak dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap pembiayaan mutu sekolah.

Dengan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mendeskripsikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP yang berada di daerah terpencil, dalam penelitian yang berjudul "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Terpencil" (Studi Komparatif antara SMPN 30 dan 43 Seluma)".

Rumusan masalah penelitian ini bagaimanakah perbedaan dan persamaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil antara SMPN 30 dan 43 Seluma? Rumusan khusus masalah penelitian ini: 1) bagaimanakah perbedaan dan persamaan penyusunan rencana anggaran dan kegiatan sekolah dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil antara SMPN 30 dan 43 Seluma? 2) bagaimanakah perbedaan dan persamaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil antara SMPN 30 dan 43 Seluma? 3) bagaimanakah perbedaan dan persamaan monitoring dan evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil antara SMPN 30 dan 43 Seluma? dan 4) bagaimanakah perbedaan dan persamaan pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil antara SMPN 30 dan 43 Seluma?

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan: 1) perbedaan dan persamaan penyusunan rencana anggaran dan kegiatan sekolah dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil antara SMPN 30 dan 43 Seluma; 2) perbedaan dan persamaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil antara SMPN 30 dan 43 Seluma; 3) perbedaan dan persamaan monitoring dan evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil antara SMPN 30 dan 43 Seluma; dan 4) perbedaan dan persamaan pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil antara SMPN 30 dan 43 Seluma.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif dengan mempergunakan

pendekatan komparasi. Pendekatan ini digunakan karena peneliti ingin membandingkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil. Untuk membandingkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil dalam penelitian ini dilihat dari aspek penyusunan rencana anggaran dan kegiatan sekolah dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil; penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil; monitoring dan evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil dan pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil.

Sudjud dalam Arikunto (1993:211) mengemukakan penelitian dengan pendekatan komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Artinya, dalam penelitian dengan pendekatan komparasi selain menemukan persamaan, juga ditemukan perbedaan-perbedaan tentang objek penelitian.

Subjek penelitian ini adalah seluruh adalah benda, hal atau tempat data untuk variabel peneliti melekat dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian tidak selalu berupa orang, tetapi dapat berupa benda, kegiatan, tempat (Arikunto, 2002:11).

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah yang terkait dalam penyusunan rencana anggaran dan kegiatan sekolah dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil; penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil; monitoring dan evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil dan pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil. Subjek penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut: (a) Observasi atau pengamatan Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek evaluasi untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan.

Tabel 1. Subjek Penelitian

| No | Subjek | Sekolah | | Jumlah |
|---------------|------------------------------|---------|---------|----------|
| | | SMPN 30 | SMPN 43 | |
| 1 | Manajer BOS Kabupaten Seluma | 1 orang | | 1 orang |
| 2 | Kepala Sekolah | 1 orang | 1 orang | 2 orang |
| 3 | Wakil Kepala Sekolah | 1 orang | 1 orang | 2 orang |
| 4 | Bendahara BOS | 1 orang | 1 orang | 2 orang |
| 5 | Guru | 1 orang | 1 orang | 2 orang |
| 6 | Komite/Orang Tua/Wali Murid | 1 orang | 1 orang | 2 orang |
| 7 | Siswa | 2 orang | 2 orang | 4 orang |
| JUMLAH | | | | 15 orang |

Larry Cristensen dalam Sugiyono (2014:235) mengemukakan bahwa observasi sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis yang ada. Selain melakukan pengamatan juga diadakan pengumpulan data tentang perbedaan dan persamaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil anatar SMPN 30 dan 43 Seluma. Mengingat begitu luasnya pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut, maka dalam penelitian ini dibatasi kepada 1) perbedaan dan persamaan penyusunan rencana anggaran dan kegiatan sekolah dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil; 2) perbedaan dan persamaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil; 3) perbedaan dan persamaan monitoring dan evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil dan 4) perbedaan dan persamaan pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil. (b) Wawancara pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Esterberg dalam Sugiyono (2014:284) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara mendalam ini dilakukan

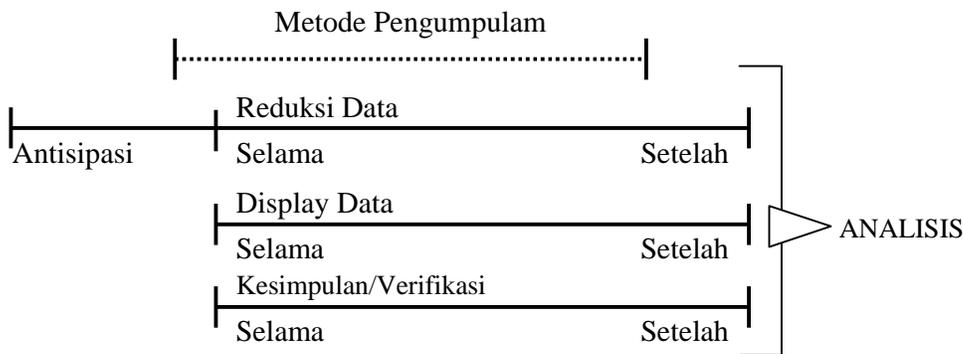
terhadap nara sumber (*key informan*) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang permasalahan penelitian yaitu tentang perbedaan dan persamaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil antara SMPN 30 dan 43 Seluma yang meliputi pada penyusunan rencana anggaran dan kegiatan sekolah dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil; penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil; monitoring dan evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil dan pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil. Oleh karena itu wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada ; Manajer BOS Kabupaten Seluma, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara BOS, guru, komite/orang tua/wali murid dan siswa. (c) Dokumentasi, penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi dari lembaga/organisasi yang telah melaksanakan program dana Bantuan Operasional Sekolah selaku pihak yang telah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah, sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan, rekaman tape recorder dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang penyusunan rencana anggaran dan kegiatan sekolah dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil; penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil; monitoring dan evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil dan pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil SMPN 30 dan.43 Seluma.

Instrumen penelitian atau instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Arikunto, 2006:106).

Sumadinata (2009:235) mengemukakan bahwa sebelum instrument penelitian disusun, perlu dibuat dulu kisi-kisi penyusunan instrument tersebut. Kisi-kisi penyusunan instrument minimal memuat tiga komponen, yaitu variable atau aspek yang akan diukur/dihimpun datanya, teknik pengumpulan data sumber data atau responden. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, kisi-kisi instrument yang peneliti gunakan untuk memperoleh data penelitian merupakan kompilasi dari pendapat para ahli dan bimbingan dari dosen dan pakar yang memahami tentang permasalahan penelitian, yaitu tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil. Terdiri dari pernyataan dan pertanyaan

yang menggambarkan variable-variabel penelitian yang terdiri dari beberapa variabel yaitu: 1) perbedaan dan persamaan penyusunan rencana anggaran dan kegiatan sekolah dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil; 2) perbedaan dan persamaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil; 3) perbedaan dan persamaan monitoring dan evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil dan 4) perbedaan dan persamaan pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil.

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan mengacu kepada pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:246-53) bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, paparan/penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan selama dan sesudah penelitian. Alur kegiatan tersebut dapat dilihat pada ilustrasi berikut:



Gambar 1. Gambar Alur Komponen dalam Analisis Data

Sumber : Sugiyono (2009:337)

Berdasarkan gambar di atas, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan antisipasi sebelum melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini akan berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, sampai kegiatan pengumpulan data dilaksanakan, peneliti membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan membuat memo.

Data yang di dapat dalam penelitian ini berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data

merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus selesai dikerjakan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis data baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi partisipan, wawancara mendalam, dokumentasi yang didapat saat melakukan kegiatan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian sebagai berikut: *Pertama*, terdapat perbedaan pada penyusunan rencana

anggaran dan kegiatan sekolah pada sekolah terpencil antara SMP Negeri 30 dan 43 Seluma, dimana pada SMP Negeri 43 Seluma dalam penyusunannya kepala sekolah sudah secara aktif melibatkan guru, menampung usulan kebutuhan dan secara rutin melakukan pelibatan guru, komite sekolah, dan elemen terkait lainnya dan penyusunan rencana anggaran dan kegiatan sekolah, sedangkan di SMP Negeri 30 Seluma hal tersebut belum dilakukan, karena penyusunan rencana anggaran dan kegiatan sekolah dilakukan oleh bendahara dan kepala sekolah saja. **Kedua**, terdapat perbedaan antara sekolah terpencil SMP Negeri 30 dan 43 Seluma dalam penggunaan dana BOS ini, dimana pada SMP Negeri 43 Seluma sekolah sudah melakukan rapat, sosialisasi dan membentuk tim manajemen yang mengelola keuangan sekolah melalui dana BOS serta transparansi dalam penggunaan keuangan sekolah. sedangkan pada sekolah terpencil 30 Selum tidak melakukan rapat dan sosialisasi dan belum membentuk tim manajemen yang mengelola keuangan sekolah melalui dana BOS. Secara transparansi, di SMP Negeri 30 Seluma juga dinilai transparan, terlihat dari ketidakpuasan guru dan komite terhadap pengelolaan dana BOS yang dilakukan. **Ketiga**, tidak terdapat perbedaan monitoring dan evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah terpencil antara SMP Negeri 30 dan 43 Seluma dilihat dari aspek pengawasan kepala sekolah dan komite sekolah serta evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh manajemen BOS dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Pusat. **Keempat**, tidak terdapat perbedaan pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah terpencil antara SMP Negeri 30 dan 43 dilihat dari aspek adanya Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2), adanya pembukuan pada kedua sekolah, adanya realisasi penggunaan dana tiap sumber dana (Formulir BOS-K7), adanya Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a), adanya bukti pengeluaran, dan adanya bukti laporan kedua sekolah yaitu SMP Negeri 30 dan 43 Seluma.

Pembahasan

Sesuai dengan hasil data yang diperoleh untuk perencanaan pemanfaatan dana BOS di SMP Negeri 30 Seluma, menurut peneliti khusus untuk program perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 30

Seluma belum efektif, karena tidak sesuai dengan buku petunjuk teknis pelaksanaan BOS bahwa dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah/PPs, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan itu harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat.

Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) atau yang sekarang disebut dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah adalah rencana biaya dan pendanaan rinci untuk tahun pertama Rencana Pembangunan Sekolah. Dalam buku "Perencanaan dan Penganggaran sekolah 2014", RKAS merupakan dokumen anggaran sekolah resmi yang harus ditandatangani oleh Komite Sekolah dan Kepala Sekolah serta penanggungjawab perumusan RKAS, untuk menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).

RKAS dibuat hanya untuk satu tahun anggaran pelajaran mendatang, dan terdiri dari dua bagian yaitu Pendapatan dan Pengeluaran. RAPBS mencakup semua biaya dan pendapatan yang ada pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan, khususnya untuk tahun anggaran mendatang. Pendapatan yang dicantumkan di RAPBS hanya mencakup dana dalam bentuk uang, baik yang akan diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.

Menurut Tilaar (2008: 76), Standarisasi dalam manajemen mutu pembelajaran bertujuan untuk menjamin ketersediaan biaya penyelenggaraan pendidikan. Setiap tahun sekolah perlu membuat RAPBS dimana di dalamnya terdapat pengalokasian sumber pendapatan dan pembiayaan sekolah. Sumber-sumber pendapatan tersebut meliputi bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dana masyarakat dan sumber lain.

Identifikasi tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa penyusunan rencana pemanfaatan dana BOS tidak melibatkan stakeholder pendidikan dan tidak membentuk tim pengelola dana. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa pernyataan dari bendahara, guru, dan komite sekolah di SMP Negeri 30 Seluma yang tidak mengetahui proses perencanaan dana BOS tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Menurut Mulyasa (2006:176) untuk mengaktifkan pembuatan anggaran belanja sekolah, yang sangat bertanggung

pelaksana adalah kepala sekolah. Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan dan berapa banyak biayanya.

Mulyasa (2003:145) mengemukakan bahwa "Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian kegiatan pembiayaan pendidikan yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan.

Perencanaan (*Planning*) pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai yang diharapkan. Gaffar (Sagala 2000 :47) Perencanaan diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Oleh karena itu perencanaan merupakan proses penetapan dan pemanfaatan sumber-sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

Perbandingan yang dilakukan tentang perencanaan dana BOS pada sekolah terampil antara SMP Negeri 30 dan 43 Seluma yang dilihat dari aspek dilakukannya penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RAKS), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RAKS) disusun sesuai petunjuk dan pedoman serta sesuai dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah, dan pelibatan guru, komite sekolah, dan elemen terkait lainnya dalam penyusunan dilakukannya penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RAKS),

Berdasarkan hasil penelitian di sekolah terampil 30 Seluma tentang perencanaan dana BOS menunjukkan sekolah sudah menyusun RKAS dan memiliki RKAS untuk setiap semesternya. RAKS yang disusun dibuat oleh sekolah. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RAKS) belum disusun sesuai petunjuk dan pedoman serta belum sesuai dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah, karena tidak melibatkan elemen terkait dalam penyusunan RKAS. Juga ditemukan bahwa sebagian guru tidak mengetahui perencanaan dan penganggaran dalam RKAS sehingga sebagian program kurang sesuai dengan harapan guru, staf

tata usaha dan komite sekolah. Dalam penyusunan RKAS belum secara aktif melibatkan guru namun menampung usulan kebutuhan dari guru meskipun program ini tidak secara rutin dilaksanakan dan tidak melalui rapat dewan guru. Hal ini menimbulkan kekecewaan dari guru, staf tata usaha dan komite karena kurangnya pelibatan mereka dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RAKS).

Berdasarkan hasil penelitian di sekolah terampil SMP Negeri 43 Seluma tentang perencanaan dana BOS terlihat bahwa Sekolah sudah menyusun RKAS dan memiliki RKAS untuk setiap semesternya. RAKS yang disusun dibuat oleh sekolah. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RAKS) sudah disusun sesuai petunjuk dan pedoman serta sudah sesuai dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah, dengan melibatkan elemen terkait dalam penyusunan RKAS. Temuan lainnya, guru, staf tata usaha dan komite sekolah dilibatkan dalam perencanaan dan penganggaran dalam RKAS semua program sudah sesuai dengan harapan guru, staf tata usaha dan komite sekolah. Dalam penyusunan RKAS sudah secara aktif melibatkan guru dengan menampung usulan kebutuhan dari guru, staf tata usaha dan komite sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian di kedua sekolah terampil SMP Negeri 30 dan 43 Seluma tersebut maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan pada penyusunan rencana anggaran dan kegiatan sekolah pada sekolah terampil antara SMP Negeri 30 dan 43 Seluma, dimana pada SMP Negeri 43 Seluma dalam penyusunannya kepala sekolah sudah secara aktif melibatkan guru, menampung usulan kebutuhan dan secara rutin melakukan pelibatan guru, komite sekolah, dan elemen terkait lainnya dan penyusunan rencana anggaran dan kegiatan sekolah, sedangkan di SMP Negeri 30 Seluma hal tersebut belum dilakukan, karena penyusunan rencana anggaran dan kegiatan sekolah dilakukan oleh bendahara dan kepala sekolah saja.

Lasari (2011:2) mengemukakan dua jenis kegiatan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan anggaran keuangan sekolah, yaitu: 1) kegiatan pengendalian keuangan sekolah, dan 2) kegiatan proses pencatatan keuangan sekolah. Kegiatan pengendalian keuangan sekolah merupakan usaha-usaha seorang administrator agar kegiatan pengadaan dan penggunaan keuangan sekolah mengar.

pencapaian tujuan sekolah secara optimal berkat adanya tindakan-tindakan secara bertanggung jawab, terbuka, jujur, tertib, cermat, kreatif, efektif, dan efisien.

Perbandingan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil antara SMPN 30 dan 43 Seluma dilihat dari adanya : a) kesesuaian penggunaan dana BOS dengan buku pedoman, juklak dan juknis BOS; b) kesesuaian penggunaan dana BOS dengan RAPBS; c) revisi RKAS dana BOS untuk kebutuhan sekolah yang paling mendesak; dan d) Transparansi pemanfaatan dana BOS.

Berdasarkan hasil penelitian di sekolah terpencil 30 Seluma tentang penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah ditemukan bahwa pembelanjaan dan penggunaan dana BOS di SMP Negeri 30 Seluma sudah sesuai dengan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari kesesuaian item pembelanjaan dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014. Di SMP Negeri 30 Seluma pembelanjaan BOS pada memiliki kesesuaian dengan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang telah disusun sebelumnya. Namun, dalam penyusunan RAPBS dan RKAS, sekolah tidak melakukan rapat, tidak melakukan sosialisasi dan belum membentuk tim manajemen yang mengelola keuangan sekolah melalui dana BOS.

Untuk revisi, pengelola BOS melakukan revisi terhadap RKAS ataupun RAPBS dana BOS untuk kebutuhan sekolah sifatnya mendesak bagi sekolah terpencil SMPN 30 Seluma. Hal itu dilakukan dengan merubah atau mengganti jumlah item pembelanjaan pada RKAS dan RAPBS pada pertengahan semester. Sedangkan untuk transparansi ditemukan bahwa perencanaan ataupun penggunaan dana BOS pada sekolah terpencil SMP Negeri 30 Seluma belum transparan. Ketidaktransparan ini terlihat dari ketidakpuasan guru, komite terhadap pengelolaan dana BOS yang dilakukan, selain itu pengelola BOS juga tidak pernah melakukan rapat, sosialisasi ataupun memajang di papan pengumuman terkait dengan perencanaan dan penggunaan dana BOS.

Berdasarkan hasil penelitian di sekolah terpencil 43 Seluma tentang penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah ditemukan hasil bahwa pembelanjaan dan penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan pedoman, petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan. Kesesuaian ini terlihat dari kesesuaian item pembelanjaan dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014. Pembelanjaan BOS pada sekolah terpencil memiliki kesesuaian dengan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang telah disusun sebelumnya. RAPBS dan RKAS, sekolah disusun dengan melakukan rapat bersama kepala sekolah, bendahara, guru, staf tata usaha dan komite sekolah, untuk selanjutnya disahkan menjadi RAPBS dan RKAS oleh bendahara, kepala sekolah dan Manajer BOS Kabupaten. Sekolah juga sudah melakukan sosialisasi dan membentuk tim manajemen yang mengelola keuangan sekolah melalui dana BOS.

Untuk revisi anggaran, pengelola BOS melakukan revisi terhadap RKAS ataupun RAPBS dana BOS untuk kebutuhan sekolah sifatnya mendesak bagi sekolah terpencil SMPN 43 Seluma. Hal itu dilakukan dengan pergeseran, penambahan maupun pengurangan anggaran dalam RAPBS dan RKAS, dengan tidak melakukan penambahan kegiatan diluar ketentuan dan pedoman BOS. Sedangkan untuk transparansi, kepala sekolah dan bendahara sudah menggunakan dan BOS sesuai untuk peruntukannya dan semuanya dilakukan secara terbuka dan transparan. Transparansi dalam pengelolaan dana BOS ini menjadikan guru, staf tata usaha dan komite sekolah puas dengan pengelolaan yang dilakukan. Pengelola juga selalu melakukan rapat, sosialisasi ataupun memajang di papan pengumuman terkait dengan perencanaan dan penggunaan dana BOS.

Berdasarkan hasil penelitian di kedua sekolah terpencil SMP Negeri 30 dan 43 Seluma tersebut maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan dan persamaan antara SMP Negeri 30 dan 43 Seluma dalam penggunaan dana BOS. Persamaannya adalah pada aspek Kesesuaian penggunaan dana BOS dengan buku pedoman, juklak dan juknis BOS serta dilakukannya revisi. Sedangkan perbedaannya pada kesesuaian penggunaan BOS dengan RAPBS dan RKAS dimana pada SMPN 30 Seluma tidak melakukan rapat, tidak melakukan sosialisasi dan belum membentuk tim manajemen yang mengelola keuangan sekolah melalui dana BOS. Perbedaan lainnya terlihat dari aspek transparansi dimana pada sekolah terpencil SMP Negeri 30

transparan. Ketidaktransparan ini terlihat dari ketidakpuasan guru, komite terhadap pengelolaan dana BOS yang dilakukan, selain itu pengelola BOS juga tidak pernah melakukan rapat, sosialisasi ataupun memajang di papan pengumuman terkait dengan perencanaan dan penggunaan dana BOS.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk penggunaan dana BOS ini terdapat perbedaan antara sekolah terpencil SMP Negeri 30 dan 43 Seluma dimana pada SMP Negeri 43 Seluma sekolah sudah melakukan rapat, sosialisasi dan membentuk tim manajemen yang mengelola keuangan sekolah melalui dana BOS serta transparansi dalam penggunaan keuangan sekolah. Sedangkan pada sekolah terpencil 30 Seluma tidak melakukan rapat dan sosialisasi dan belum membentuk tim manajemen yang mengelola keuangan sekolah melalui dana BOS. Secara transparansi, di SMP Negeri 30 Seluma juga dinilai transparan, terlihat dari ketidakpuasan guru dan komite terhadap pengelolaan dana BOS yang dilakukan.

Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyimpangan keuangan dan mengoreksi kesalahan pencatatan yang mungkin terjadi. Pengawasan dapat secara internal dan eksternal, dapat pula dilakukan secara struktural maupun fungsional yang mencakup pemeriksaan, pembinaan dan evaluasi. Sedangkan pengendalian cenderung dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung, sebagai upaya korektif dan antisipatif terhadap pelaksanaan tugas pengelola.

Monitoring adalah satu-satunya upaya untuk mengumpulkan informasi tentang kenyataan program dalam rangka membantu pengelola program untuk menjawab semua pertanyaan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan. Hasil dari monitoring ini digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan pelaksanaan program, juga sebagai masukan dalam mengevaluasi program.

Evaluasi adalah suatu upaya untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap pelaksanaan program berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari hasil monitoring maupun hasil lainnya. Analisis dan penilaian yang dimaksud meliputi: (1) apakah program tersebut diperlukan, atau perlu disempurnakan/diperbaiki? (2) apakah sesuai dengan sasaran? (3) apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan?

Agar monitoring dan evaluasi mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlunya peningkatan kualitas personil di semua tingkatan

(pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah) sehingga dapat meningkatkan motivasi semangat transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.

Perbandingan monitoring dan evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil antara SMPN 30 dan 43 Seluma dilihat dari adanya, dilakukannya monitoring oleh Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Pusat, dilakukannya monitoring oleh Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Propinsi, dan dilakukannya monitoring oleh Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian di sekolah terpencil 30 Seluma tentang monitoring dan evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah ditemukan bahwa meski belum secara rutin, namun kepala sekolah sudah memeriksa penggunaan dana BOS kepada bendahara, baik pemeriksaan administrasi pembukuan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban serta bukti-bukti pengeluaran. Monitoring dan evaluasi BOS rutin dilaksanakan per triwulan dari Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma. Komite Sekolah sebagai unsur masyarakat pun tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memonitoring dan mengevaluasi penggunaan dana BOS, dan guru mengetahui dilakukannya monitoring dan evaluasi dana BOS, namun tidak tahu siapa yang melakukannya.

Sedangkan Hasil penelitian di sekolah terpencil 43 Seluma tentang monitoring dan evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah ditemukan bahwa kepala sekolah selalu rutin memeriksa penggunaan dana BOS tersebut kepada bendahara, baik pemeriksaan administrasi pembukuan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban serta bukti-bukti pengeluaran. Monitoring dan evaluasi BOS rutin dilaksanakan per triwulan dari Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma. Komite Sekolah sebagai unsur masyarakat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memonitoring dan mengevaluasi penggunaan dana BOS, dan guru mengetahui dilakukannya monitoring dan evaluasi dana BOS, namun tidak tahu kapan dan dimana dilakukan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disir

perbedaan monitoring dan evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah terpencil antara SMP Negeri 30 dan 43 Seluma, dilihat dari pengawasan kepala sekolah dan komite sekolah serta evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh manajemen BOS dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Provinsi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pusat.

Berdasarkan hasil penelitian dan implikasinya terhadap teori pelaporan, maka dapat disimpulkan pelaporan dana BOS di SMP Negeri 30 Seluma dan 43 Seluma sudah dilakukan khususnya dalam pelaporan pemanfaatan dana BOS. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS sudah dilakukan tepat waktu, pelaporan disampaikan pihak sekolah kepada satuan kerja kabupaten/kota.

Pada penelitian ini, perbedaan pelaporan antara kedua sekolah terpencil SMP Negeri 30 Seluma dan 43 Seluma dilihat dari: (1) Pelaporan disusun dan dibuat disertai dengan bukti-bukti, (2) pelaporan pertanggungjawaban dilakukan selambat-lambatnya sebelum tanggal 10 pada bulan pertama setiap triwulan, (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana disampaikan melalui rapat guru ataupun komite.

Pelaporan merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian informasi yang dilakukan secara teratur tentang komponen proses, hasil dan pengaruh suatu kegiatan kepada pihak yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap kelancaran dan tindak lanjut program. Pelaporan berfungsi sebagai media komunikasi, pertanggung jawaban dan bahan dokumentasi. Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggungjawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana. Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 30 Seluma dan 43 Seluma bahwa: Kaitannya dengan pelaporan pemanfaatan dana BOS, setelah pelaksanaan program dibuatkan laporan pertanggungjawabannya kepada tim manajemen tingkat kota. Semua pengeluaran harus sesuai dengan apa yang tertera dalam RKAS (Format BOS K-2).

Berkenaan dengan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut, Tim Manajemen Sekolah diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan setiap triwulan. Laporan tersebut harus disampaikan kepada Tim Manajemen BOS

Kabupaten dan provinsi. Laporan yang sampai di Kota diteliti terlebih dahulu apakah sudah dibuat sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk lainnya tentang penggunaan keuangan negara, dan apabila laporan tersebut masih banyak atau ada terdapat kesalahan dan kekeliruan maka Tim Manajemen BOS Kabupaten akan mengembalikan laporan tersebut ke sekolah untuk segera mungkin diperbaiki.

Pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan sekolah menyangkut seluruh pengeluaran dana sekolah dalam satu bulan dan triwulan dalam kaitannya dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses pelaporan ini disebut sebagai auditing. Cormark (Mulyasa, 2006:178) menyatakan bahwa auditing (pertanggungjawaban) merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan, sedangkan apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas. Proses ini menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak. Bila terjadi pemeriksaan keuangan BOS, perlu dibuat berita acara mengenai proses pemeriksaan dan hasilnya yang ditandatangani bendaharawan. Pihak berwenang melakukan pemeriksaan berita acara untuk memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan tugas bendaharawan dan sebagai dasar untuk pemeriksaan selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian Zahara (2012:92), pelaporan dana BOS dikatakan efektif apabila: 1) pelaporan pertanggungjawaban dilakukan secara rutin, 2) pelaporan pertanggungjawaban dilakukan selambat-lambatnya sebelum tanggal 10 pada bulan pertama setiap triwulan. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana. Hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan.

Jika ditinjau dari aspek pengelolaan keuangan sekolah, menurut pandangan Mulyasa (2002:167) "untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pendidikan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan." Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan pengelolaan dana bantuan operasional sek

terpencil SMP 30 dan 43 Seluma sudah dilakukan secara transparan sebab laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS disampaikan kepada guru dan dewan guru, dengan melibatkan elemen terkait dalam penyusunan laporan dana BOS. Selain itu, penyampaian laporan dan BOS sudah dilakukan tepat waktu.

Pada umumnya sekolah mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, karena keterbatasan kemampuan dan fasilitas serta adanya upaya untuk mengatur agar laporan penggunaan sesuai dengan ketentuan penggunaan dana dalam petunjuk pelaksanaan. Untuk menjamin pengelolaan dana BOS transparan dan akuntabel serta mampu memenuhi tuntutan dan rasa keadilan masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan anggota komite sekolah agar dapat mengambil peran yang semestinya dan benar-benar berfungsi sebagai lembaga kontrol yang efektif baik dalam proses perumusan RAPBS maupun pada aspek pemanfaatan dana-dana sekolah.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, hendaknya laporan pertanggungjawaban dana BOS harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :1) Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya 2) Seluruh arsip data keuangan baik berupa laporan-laporan keuangan maupun pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal Kejadiannya, serta disimpan disuatu tempat yang aman dan mudah ditemukan setiap saat 3) Laporan penggunaan dana BOS dari penanggungjawab/pengelola Liana BOS ditingkat sekolah kepada tim manajemen BOS kabupaten/kota Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOS, masing-masing pengelola program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten/kota, sekolah/pps) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah terpencil antara SMP Negeri 30 dan 43 Seluma yang dilihat dari tersedianya bukti-bukti penggunaan dana, waktu pelaporan yang digunakan untuk menyampaikan pelaporan dan pertanggung jawaban laporan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan secara umum penelitian ini yaitu terdapat perbedaan dan persamaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil antara SMPN 30 dan 43 Seluma. Perbedaannya yaitu pada penyusunan rencana anggaran dan kegiatan sekolah dana Bantuan Operasional Sekolah dan penggunaan dana BOS di sekolah terpencil. Persamaannya yaitu pada penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil, monitoring dan evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil, dan pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah terpencil.

Simpulan khusus penelitian sebagai berikut: **Pertama**, terdapat perbedaan pada penyusunan rencana anggaran dan kegiatan sekolah pada sekolah terpencil antara SMP Negeri 30 dan 43 Seluma, dimana pada SMP Negeri 43 Seluma dalam penyusunannya kepala sekolah sudah secara aktif melibatkan guru, menampung usulan kebutuhan dan secara rutin melakukan pelibatan guru, komite sekolah, dan elemen terkait lainnya dan penyusunan rencana anggaran dan kegiatan sekolah, sedangkan di SMP Negeri 30 Seluma hal tersebut belum dilakukan, karena penyusunan rencana anggaran dan kegiatan sekolah dilakukan oleh bendahara dan kepala sekolah saja. **Kedua**, terdapat perbedaan antara sekolah terpencil SMP Negeri 30 dan 43 Seluma dalam penggunaan dana BOS ini, dimana pada SMP Negeri 43 Seluma sekolah sudah melakukan rapat, sosialisasi dan membentuk tim manajemen yang mengelola keuangan sekolah melalui dana BOS serta transparansi dalam penggunaan keuangan sekolah. sedangkan pada sekolah terpencil 30 Seluma tidak melakukan rapat dan sosialisasi dan belum membentuk tim manajemen yang mengelola keuangan sekolah melalui dana BOS. Secara transparansi, di SMP Negeri 30 Seluma juga dinilai transparan, terlihat dari ketidakpuasan guru dan komite terhadap pengelolaan dana BOS yang dilakukan. **Ketiga**, tidak terdapat perbedaan monitoring dan evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah terpencil antara SMP Negeri 30 dan 43 Seluma dilihat dari aspek pengawasan kepala sekolah dan komite sekolah serta evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh manajemen BOS dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Pusat. **Keempat**, tidak terdapat perbedaan pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah

terpencil antara SMP Negeri 30 dan 43 dilihat dari aspek adanya Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2), adanya pembukuan pada kedua sekolah, adanya realisasi penggunaan dana tiap sumber dana (Formulir BOS-K7), adanya Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a), adanya bukti pengeluaran, dan adanya bukti laporan kedua sekolah yaitu SMP Negeri 30 dan 43 Seluma.

Saran

Saran penelitian ini sebagai berikut: **Pertama**, kepada Pemerintah untuk melanjutkan program BOS yang sudah dilaksanakan, dengan mempertimbangkan upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan komite sekolah dan seluruh pengelola sekolah agar tercipta peningkatan mutu pendidikan termasuk bagi sekolah di daerah terpencil. **Kedua**, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma untuk memperhatikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dana BOS, agar dana BOS yang dipergunakan sekolah memberikan dampak terhadap pengembangan mutu sekolah. Mutu yang dimaksud disini adalah mutu pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan yang terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. **Ketiga**, sekolah di daerah terpencil seperti SMP Negeri 30 dan 43 Seluma harus dapat memanfaatkan dana BOS untuk operasional sekolah dan sekaligus melakukan pengembangan mutu sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan, karena sumber dana yang dimiliki

sebagian besar sekolah sekarang semata-mata hanya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). **Keempat**, kepada pihak terkait untuk dapat memantau dan mengevaluasi pemanfaatan dana BOS sehingga dana BOS oleh sekolah benar-benar diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar sesuai dengan buku Panduan BOS yang ditetapkan oleh Pemerintah.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dirjen Dikdasmen Kemendikbud. 2014. *Petunjuk Teknis: Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah 2014*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI.
- Harsono. 2007. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Huberman, Wilian JS. 1996. *Analisis Data Evaluatif*. Yogyakarta: Gjah Mada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriyono, R.2000. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- TIM LPPM-IPB. 2009. *Survey Kepuasan Orang Tua terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar Standar yang disediakan oleh Sistem Desentralisasi Pendidikan*. Kerjasama Institut Pertanian Bogor dan PRMAP-ADB-Bappenas. Tidak diterbitkan. Intitut Pertanian Bogor.